

PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA WISATA DETUSOKO BARAT KABUPATEN ENDE

John Chrysostomus Sado¹, Gregorius Sahdan²

Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
“APMD” Yogyakarta^{1,2}

E-mail: ostosado00@gmail.com¹, gorissahdan@yahoo.com²

ABSTRAK

Pariwisata membawa dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan bagi masyarakat dan daerah setempat. Desa Wisata Detusoko Barat merupakan salah satu Desa Wisata yang berada di Kabupaten Ende. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Desa Wisata Detusoko Barat Kabupaten Ende. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang muncul pasca pengoperasian Desa Wisata Detusoko Barat Tahun 2021. Melalui penelitian berjenis deskriptif kualitatif dan didukung oleh data primer berupa informasi dari para pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Desa Wisata Detusoko Barat. Menggunakan kajian *good tourism governance* melalui pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan tata kelola kepariwisataan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Detusoko Barat dalam pengelolaannya melibatkan semua pemangku kepentingan, masyarakat sebagai pelaku utama, adanya pelatihan pengembangan sumber daya pengelola, nilai promosi yang kurang signifikan, dan tidak memiliki buku induk pembangunan. Pengembangan dan pengelolaan sebagai desa wisata unggul dilakukan dengan inovasi berbasis masyarakat. Kolaborasi masyarakat lokal, pokdarwis dan pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk keberlanjutan pariwisata.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Pariwisata Berkelanjutan, dan Kolaborasi Masyarakat*

ABSTRACT

Tourism has significant economic, social, and cultural impacts on local communities and regions. Detusoko Barat Tourism Village is one of the Tourism Villages located in Ende Regency. This study aims to determine the management of Detusoko Barat Tourism Village in Ende Regency. This research is motivated by problems that emerged following the operation of Detusoko Barat Tourism Village in 2021. It employs a qualitative descriptive approach and is supported by primary data obtained from stakeholders directly involved in the management of the tourism village. The study applies the concept of good tourism governance through sustainable tourism development with proper tourism management practices. The results of the study show that the management of Detusoko Barat Tourism Village involves all stakeholders, with the community serving as the main actor. There are capacity-building trainings for tourism managers, although the promotional value remains insignificant, and the village lacks a master development plan. The development and management of the village as a leading tourism destination are carried out through community-based innovations. Collaboration among local communities, tourism awareness groups (Pokdarwis), and the village government plays a key role in utilizing natural resources for sustainable tourism.

Keywords: *Management, Sustainable Tourism, and Community Collaboration*

PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor strategis yang diandalkan sebagai penyumbang devisa dan motor penggerak ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Untuk menjamin keberlanjutan manfaatnya, pengembangan pariwisata modern menuntut adanya

Copyright (c) 2025 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

penerapan model tata kelola yang baik atau *good tourism governance*. Konsep ini pada hakikatnya mensyaratkan adanya sebuah sistem kolaboratif yang sinergis, di mana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal bekerja sama sebagai mitra yang setara. Kerjasama lintas sektor ini menjadi kunci dalam mengintegrasikan program, mengoptimalkan sumber daya, serta memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan suatu destinasi tidak lagi hanya bergantung pada keindahan alamnya, melainkan pada kualitas kolaborasi para pemangku kepentingannya.

Kerangka kerja untuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas ini mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri, termasuk dalam mengelola potensi wisata yang dimiliki (Harahap dan Ramli, 2023). Kebijakan desentralisasi ini, sebagaimana dikemukakan oleh Desrinelti et al. (2021), memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan desa untuk merumuskan regulasi yang sesuai dengan konteks lokal. Pelimpahan kewenangan ini bertujuan agar inisiatif pembangunan, termasuk pembentukan desa wisata, dapat berjalan efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, sejalan dengan tujuan utama otonomi daerah (Matthoriq et al., 2021).

Sejalan dengan semangat otonomi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ende telah menetapkan arah pengembangan pariwisatanya secara terstruktur dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparkab) untuk periode 2014-2034. Dalam dokumen strategis ini, pengembangan desa wisata menjadi salah satu program unggulan untuk mendistribusikan manfaat ekonomi pariwisata secara lebih merata ke seluruh wilayah. Kesuksesan implementasi rencana induk ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat kabupaten hingga ke level desa. Inisiatif dari bawah, yang didukung oleh kebijakan dari atas, diharapkan mampu menciptakan destinasi-destinasi baru yang otentik, berdaya saing, dan dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakatnya sendiri, sehingga pariwisata benar-benar menjadi alat untuk mencapai kemandirian desa (Hastutik et al., 2021; Susetyaningsih et al., 2023).

Salah satu kawasan yang diidentifikasi memiliki potensi strategis luar biasa di Kabupaten Ende adalah Desa Wisata Detusoko Barat. Desa ini menawarkan paket ekowisata yang lengkap dan unik, menjadikannya sebagai salah satu aset pendukung utama menuju gerbang destinasi ikonik Danau Kelimutu. Keunggulan utamanya terletak pada lanskap alam yang memukau, berupa pemandangan sawah bertingkat, perbukitan hijau, dan lembah yang asri. Wisatawan tidak hanya disuguhkan pemandangan, tetapi juga diajak untuk merasakan pengalaman otentik melalui berbagai paket kegiatan. Paket-paket ini mencakup wisata persawahan, susur sungai, interaksi dengan komunitas adat, kunjungan ke air terjun, hingga kesempatan untuk menginap di *homestay* milik warga, yang semuanya dirancang untuk memberikan pengalaman mendalam bagi pengunjung (Hastutik et al., 2021; Sari & Suryawan, 2023).

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Desa Detusoko Barat menawarkan serangkaian aktivitas wisata esperensial yang menjadi daya tarik utamanya. Wisatawan dapat terlibat langsung dalam proses pengolahan kopi tradisional, mulai dari memanen biji kopi di kebun hingga menyangrai dan menumbuknya bersama warga lokal. Selain itu, terdapat pula paket *trekking* sawah yang memungkinkan wisatawan untuk merasakan sensasi menjadi "petani dalam satu hari" dengan ikut menanam atau memanen padi. Sebagai pusat kuliner dan tempat bersantai, telah didirikan Lepalio Café yang menyajikan hidangan khas lokal dengan latar pemandangan persawahan yang indah. Beragamnya paket wisata yang terstruktur ini

menunjukkan bahwa Desa Detusoko Barat telah memiliki konsep produk wisata yang matang dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut (Jamu & Langga, 2020; Suharti et al., 2023).

Dalam aspek pengelolaan, Pemerintah Desa Detusoko Barat telah membentuk sebuah lembaga kemitraan berbasis masyarakat, yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nira Neni. Dibentuk secara resmi melalui Surat Keputusan Kepala Desa pada tahun 2021, Pokdarwis ini diberi mandat untuk membantu pemerintah desa dalam mengembangkan dan mengelola seluruh potensi wisata. Potensi tersebut mencakup lima pilar utama: atraksi wisata kopi, wisata panen padi, susur sawah, pertunjukan sanggar budaya, serta pengembangan kuliner dan produk oleh-oleh khas. Dengan adanya struktur kepengurusan yang jelas, Pokdarwis Nira Neni secara formal menjadi representasi keterlibatan masyarakat dan diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam operasional harian desa wisata, mulai dari pemanduan hingga promosi kegiatan (Listyorini et al., 2021; Sukarno et al., 2023).

Meskipun memiliki potensi yang luar biasa dan struktur kelembagaan yang telah terbentuk, Desa Wisata Detusoko Barat menghadapi tantangan serius dalam aspek pengelolaan pasca-peresmian pada tahun 2021. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi minimnya keterlibatan aktif masyarakat luas dalam pengelolaan, tidak adanya sistem pendataan pengunjung yang akurat, lemahnya upaya promosi, serta kurangnya ketersediaan fasilitas dasar seperti toilet umum dan tempat sampah. Berbagai persoalan ini menunjukkan adanya disfungsi dalam sistem kolaborasi yang ada dan secara serius mengancam keberlanjutan Desa Wisata Detusoko Barat dalam jangka panjang, sehingga memerlukan analisis mendalam untuk menemukan solusi yang tepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam fenomena pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Detusoko Barat, Kabupaten Ende. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menguraikan kompleksitas interaksi para pemangku kepentingan dan proses manajerial yang terjadi di lapangan. Seluruh proses penelitian dan analisis dipandu oleh paradigma tata kelola kepariwisataan yang baik (*good tourism governance*). Paradigma ini digunakan sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi aspek-aspek kunci seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam seluruh aktivitas pengelolaan destinasi wisata tersebut, sehingga analisis menjadi lebih terarah dan sistematis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan sumber data primer dan sekunder untuk memperoleh informasi yang kaya dan komprehensif. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang dipilih secara purposif. Informan tersebut meliputi pengelola desa wisata, perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha pariwisata lokal. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif untuk mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan, kondisi fasilitas wisata, dan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yang mencakup dokumen perencanaan desa, laporan kegiatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta regulasi terkait.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model analisis kualitatif yang terdiri dari tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan data mentah dari catatan lapangan hasil wawancara dan observasi. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), di mana data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk uraian naratif, matriks, dan bagan untuk memudahkan pemahaman pola serta hubungan antarvariabel. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan

(*conclusion drawing*) dan verifikasi, yaitu proses menginterpretasikan temuan secara berkelanjutan dan memeriksa kebenarannya melalui triangulasi sumber untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kondisi Geografis Desa Wisata Detusoko Barat

Desa Wisata Detusoko Barat yang terletak di Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende, yang menghubungkan antara suku Ende dan Lio. Secara geografis Desa Wisata Detusoko Barat, dikelilingi empat kabupaten disekitarnya seperti; Kabupaten Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Manggarai Barat. Berada di ketinggian 800 meter diatas permukaan laut dan dibedakan menggunakan hamparan sawah bertingkat yang sangat luas. Mayoritas masyarakat di Desa Wisata Detusoko Barat memiliki sawah yang diwarisi dari nenek moyang dan bersifat turun temurun. Terdapat jembatan kali Lowaria yang berwarna cerah disekitaran sawah bertingkat, kolam air panas Ae Oka yang dipercayakan menurut masyarakat setempat dapat menyembuhkan penyakit kulit. Penerapan prinsip-prinsip *good tourism governance* menurut Bambang Sunaryo untuk melakukan pengelolaan pada sektor pariwisata. Pengelolaan kepariwisataan yang baik menggunakan tiga konsep dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan swasta (Mojokerto, 2024).

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan dalam pengelolaan Desa Wisata Detusoko Barat mengacu pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaanya. Masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan promosi wisata. Keterlibatan dalam pengelolaan tersebut berawal dari pemerintahan desa hingga semua pemangku kepentingan dalam dunia usaha. Keterlibatan masyarakat mulai menurun semenjak Tahun 2023-2025 karena disibukan dengan urusan pertanian lainnya yang menjadi sumber utama penghasilan. Pokdarwis Niraneni sebagai pengelola Desa Wisata Detusoko Barat mempunyai peran penting, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pengetahuan pengelolaan desa wisata. Pokdarwis bertugas untuk memberikan kesadaran terkait potensi wisata yang dapat dijadikan sebagai objek bagi pengunjung di Detusoko Barat, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata. Pokdarwis Niraneni bertanggungjawab akan kelestarian budaya dan lingkungan lokal dengan mendukung pengembangan secara berkelanjutan. Pokdarwis Niraneni sebagai penggerak utama dengan memberikan masukan dan usulan terkait pelatihan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan dalam menyediakan layanan yang baik wisatawan. Pokdarwis Niraneni juga sebagai penghubung masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis dalam menciptakan pariwisata yang bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pelatihan pada Masyarakat

Program pelatihan terkait pengembangan Desa Wisata Detusoko Barat terhadap masyarakat merupakan elemen penting sebagai penunjang. Kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki pada objek wisata dengan tujuan peningkatan atau pengembangan. Pemerintahan Detusoko Barat melakukan kerja sama dengan *British Council* dan Kemenperaf dalam melakukan pelatihan terkait pengembangan desa wisata. Pelatihan dilakukan dengan tujuan menciptakan masyarakat sebagai penggerak utama Desa Wisata Detusoko Barat. Keterampilan masyarakat berdampak sangat signifikan terhadap proses pengembangan Desa Wisata Detusoko Barat. Pelatihan tersebut dilakukan terhadap masyarakat dan Pokdarwis Niraneni sebagai lembaga pengelola terkait. Pelatihan tersebut menambah pengetahuan masyarakat terhadap pengembangan wisata dengan tidak menghilangkan atau mengabaikan budaya setempat. Pelatihan pengelolaan hingga

pada tingkat promosi, yang menciptakan masyarakat Detusoko Barat yang mandiri dalam pengembangan usaha ekonomi. Pelatihan tersebut menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam keterampilan pengembangan desa wisata secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Desa Wisata Detusoko Barat sangat signifikan berawal dari Tahun 2020-2022, keterlibatan masyarakat mengalami penurunan mulai Tahun 2023, minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan diakibatkan sumber penghasilan masyarakat bersumber dari pertanian sehingga kesibukan bertani menjadi titik utama sebagai pendapatan ekonomi, hal ini juga berdampak pada pengelolaan yang kurang signifikan.

Promosi Nilai Budaya Lokal

Pengembangan pariwisata berkelanjutan pada objek Desa Wisata Detusoko Barat, pemerintah dan pokdarwis melalui promosi memperkenalkan, melestarikan dan mengedepankan nilai budaya lokal. Kegiatan promosi yang dilakukan dengan tujuan menarik wisatawan berkunjung. Memperkenalkan dan promosi dilakukan melalui media, festival, produk kuliner, dan pertunjukan seni nilai budaya secara langsung kepada wisatawan yang berkunjung maupun melalui media. Daya tarik yang menjadi objek promosi pada Desa Wisata Detusoko Barat yaitu; keindahan alam pegunungan, Desa Detusoko Barat terletak di pegunungan dengan pemandangan sawah yang bersusun, wisatawan menikmati sejuknya udara pada pegunungan sambil berjalan kaki atau bersepeda menyusuri desa, aktivitas trekking di sekitaran desa menambah daya tarik yang unik. Festival budaya menjadi objek promosi, seringkali masyarakat menyelenggarakan berbagai festival budaya yang menampilkan tarian adat, ritual adat dengan mempertahankan keasliannya. Selanjutnya kuliner lokal yang menjadi daya tarik dalam mempromosikan desa wisata, daya tariknya yaitu nasi jagung yang sering disajikan dengan berbagai lauk tradisional, kopi organik yang diolah secara tradisional, serta mengikuti kegiatan panen kopi bersama masyarakat. Permasalahan yang ditimbulkan karena Desa Wisata Detusoko Barat tidak mempunyai buku induk pembangunan, sehingga permasalahan yang ditimbulkan tidak dapat memberikan solusi secara tepat, tidak terdapat aplikasi khusus atau website dalam melakukan pelayanan kegiatan wisata secara online terhadap kebutuhan kepariwisataan di Desa Wisata Detusoko Barat.

Pembahasan

1. Potensi Alam dan Budaya sebagai Fondasi Desa Wisata

Desa Wisata Detusoko Barat memiliki modal dasar yang sangat kuat untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang berakar pada keunikan kondisi geografis dan kekayaan budayanya. Terletak di ketinggian 800 mdpl di Kabupaten Ende, desa ini menyajikan lanskap alam yang memukau berupa hamparan sawah bertingkat yang diwariskan secara turun-temurun. Keindahan alam ini diperkaya dengan daya tarik spesifik seperti Jembatan Lowaria dan sumber air panas Ae Oka yang memiliki nilai kepercayaan lokal. Posisi strategisnya yang menghubungkan suku Ende dan Lio serta dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten wisata lain menempatkannya sebagai destinasi potensial. Fondasi berupa aset alam yang otentik dan warisan agraria yang kental inilah yang menjadi daya tarik utama, menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dari pariwisata massal dan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan Flores yang asli (Putra et al., 2023; Sari & Suryawan, 2023).

2. Tata Kelola Partisipatif sebagai Kerangka Ideal

Pengembangan Desa Wisata Detusoko Barat mengadopsi prinsip *good tourism governance*, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara tiga pilar utama: pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta. Kerangka kerja ideal ini menempatkan partisipasi sebagai kunci keberhasilan, di mana pengelolaan pariwisata tidak lagi bersifat top-down, melainkan sebuah gerakan bersama yang terkoordinasi. Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan regulator, pihak swasta sebagai mitra investasi dan pemasaran, sementara

masyarakat menjadi subjek utama yang merencanakan, melaksanakan, dan merasakan manfaat langsung dari kegiatan pariwisata. Model tata kelola partisipatif ini bertujuan untuk menciptakan sebuah ekosistem pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan aspirasi dan kearifan lokal (Moreta & Harirah, 2023; Satoto et al., 2024; Utami, 2023).

3. Peran Sentral Pokdarwis Niraneni sebagai Motor Penggerak

Di tengah kerangka tata kelola partisipatif, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Niraneni memegang peranan yang sangat sentral dan strategis sebagai motor penggerak utama di tingkat akar rumput. Pokdarwis tidak hanya berfungsi sebagai pengelola operasional, tetapi juga sebagai agen perubahan yang multi-peran. Mereka secara aktif melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi wisata yang dimiliki, mendorong partisipasi aktif dalam setiap kegiatan, serta menjadi garda terdepan dalam pelestarian budaya dan lingkungan. Lebih dari itu, Pokdarwis Niraneni bertindak sebagai jembatan vital yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah dan peluang bisnis dari sektor swasta. Dengan mengadvokasikan kebutuhan pelatihan dan memberikan masukan strategis, Pokdarwis memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Detusoko Barat tetap berpusat pada pemberdayaan dan kemandirian komunitas lokal (Setiawan et al., 2023; Sukarno et al., 2023).

4. Investasi Sumber Daya Manusia melalui Program Pelatihan

Keberhasilan pariwisata berbasis komunitas sangat bergantung pada kapasitas dan keterampilan sumber daya manusianya. Menyadari hal ini, pemerintah Detusoko Barat, bekerja sama dengan lembaga kredibel seperti British Council dan Kemenparekraf, telah melakukan investasi penting melalui program pelatihan bagi masyarakat dan Pokdarwis. Pelatihan ini dirancang secara komprehensif, tidak hanya mencakup keterampilan teknis seperti manajemen dan promosi, tetapi juga penanaman pemahaman mengenai pariwisata berkelanjutan yang menghargai budaya lokal. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat agar tidak menjadi penonton, melainkan menjadi pelaku utama yang mampu menyediakan layanan berkualitas bagi wisatawan, mengelola usaha secara mandiri, dan pada akhirnya menjadi mitra setara dalam pengembangan desa wisata. Investasi pada peningkatan kapasitas manusia ini merupakan langkah fundamental untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas layanan pariwisata jangka panjang (Istimal & Muhyidin, 2023; Tapparan et al., 2022).

5. Tantangan Utama: Dilema antara Pariwisata dan Pertanian

Di balik potensi dan upaya yang telah dilakukan, penelitian ini mengungkap sebuah tantangan fundamental yang mengancam keberlanjutan Desa Wisata Detusoko Barat: menurunnya tingkat partisipasi masyarakat sejak tahun 2023. Penyebab utamanya adalah konflik prioritas antara kegiatan pariwisata dengan pertanian, yang masih menjadi sumber penghasilan utama dan lebih terjamin bagi sebagian besar warga. Fenomena ini mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata saat ini belum cukup signifikan, konsisten, atau merata untuk dapat bersaing dengan pendapatan dari pertanian. Dilema ini menyoroti sebuah isu krusial dalam pengembangan desa wisata di wilayah agraris, di mana pariwisata masih dianggap sebagai kegiatan sekunder. Tanpa adanya model bisnis pariwisata yang lebih menguntungkan, risiko stagnasi akibat rendahnya partisipasi akan terus menjadi hambatan utama (Moreta & Harirah, 2023; Tresiana & Kartika, 2024).

6. Kelemahan Struktural: Absennya Perencanaan dan Infrastruktur Digital

Permasalahan partisipasi masyarakat diperparah oleh adanya dua kelemahan struktural yang signifikan dalam pengelolaan desa wisata ini. Pertama, tidak adanya buku induk pembangunan atau sebuah rencana induk (master plan) yang jelas. Absennya dokumen perencanaan strategis ini menyebabkan pengembangan berjalan secara reaktif dan tambal

sulam, tanpa arah yang jelas dan terukur. Akibatnya, setiap masalah yang muncul tidak dapat diselesaikan dengan solusi yang sistematis dan berkelanjutan. Kedua, kelemahan fatal di era modern adalah tidak adanya infrastruktur digital seperti situs web resmi atau aplikasi khusus untuk pelayanan dan promosi. Hal ini secara drastis membatasi jangkauan pasar, mempersulit calon wisatawan untuk mendapatkan informasi dan melakukan reservasi, serta menciptakan citra destinasi yang kurang profesional dan siap bersaing.

7. Sintesis dan Arah Pengembangan ke Depan

Secara keseluruhan, Desa Wisata Detusoko Barat memiliki aset alam dan budaya yang luar biasa dengan kelembagaan lokal (Pokdarwis) yang aktif dan telah didukung oleh program pelatihan. Namun, potensi besar ini terancam oleh dua masalah utama: menurunnya partisipasi masyarakat karena pariwisata belum cukup menguntungkan secara ekonomi, serta ketiadaan rencana induk dan platform digital yang menghambat pertumbuhan profesional. Oleh karena itu, arah pengembangan ke depan harus fokus pada dua hal. Pertama, inovasi produk wisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi langsung dan lebih besar kepada masyarakat untuk meningkatkan insentif partisipasi. Kedua, pemerintah dan pemangku kepentingan harus segera menyusun rencana induk pembangunan yang komprehensif dan membangun infrastruktur digital yang memadai. Tanpa mengatasi kedua kelemahan fundamental ini, potensi emas Detusoko Barat akan sulit untuk dioptimalkan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan, penulis menyimpulkan bahwa Desa Wisata Detusoko Barat dalam pengelolaannya, didasari pada keterlibatan semua pemangku kepentingan. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, melakukan pelatihan sebagai upaya pendalaman pengetahuan dalam pengembangan desa wisata, nilai promosi yang masih kurang signifikan, tidak mempunyai buku induk pembangunan dan website khusus pelayanan pariwisata. Pengembangan dan pengelolaan sebagai desa wisata unggul dilakukan dengan inovasi berbasis masyarakat. Kolaborasi masyarakat lokal, pokdarwis dan pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya alam merupakan strategi untuk menerapkan sistem keberlanjutan pariwisata atau pariwisata jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Desrinelti, et al. (2021). *Kebijakan publik: Konsep pelaksanaan*.
- Harahap, R. O., & Ramli, A. H. (2023). Pengaruh work-life balance terhadap perceived work productivity pada non-government organization. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(3), 2915–2922.
- Hastutik, D., et al. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan desa wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension*, 45(1), 46. <https://doi.org/10.20961/agritexts.v45i1.51539>
- Istimal, I., & Muhyidin, A. (2023). Pengelolaan sampah sebagai pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kampung Ekowisata. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.21632/jpmi.5.1.61-69>
- Jamu, M. E., & Langga, L. (2020). Strategi perencanaan obyek wisata kawasan ternak Deturia di Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende. *AnalisiS*, 9(2), 41. <https://doi.org/10.37478/als.v9i2.298>
- Listyorini, H., et al. (2021). Merintis desa wisata, menguatkan kerjasama badan usaha milik desa dan kelompok sadar wisata. *KACANEGARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v5i1.1076>

- Matthoriq, et al. (2021). Collaborative governance dalam tata kelola pariwisata-desa (studi pariwisata-desa ‘Bumiaji Agrotourism’ di Kota Wisata Batu). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(1), 20–29.
- Moreta, A., & Harirah, Z. (2023). Collaborative governance dalam pengembangan desa wisata Nagari Tuo Pariangan pada tahun 2021-2022. *Journal of Social and Policy Issues*, 106. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.180>
- Putra, R. E., et al. (2023). Karakteristik pengunjung pada wisata alam air terjun Batu Putu Kota Bandar Lampung. *Jurnal Belantara*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.29303/jbl.v6i1.765>
- Sari, P. E. P., & Suryawan, I. B. (2023). Pengelolaan sampah terpadu dalam pariwisata berbasis masyarakat di Desa Bindu, Badung. *Jurnal IPTA*, 11(1), 107. <https://doi.org/10.24843/ipta.2023.v11.i01.p15>
- Satoto, S., et al. (2024). Revitalization of village-owned enterprises to strengthen the community economy in Indonesia: Between policy and prosperity. *Jambe Law Journal*, 7(2), 509. <https://doi.org/10.22437/home.v7i2.364>
- Setiawan, D. F., et al. (2023). Restrukturisasi sistem dan tata kelola wisata melalui pendekatan desa wisata dan community based tourism Kabupaten Bantul. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(2), 1737. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i2.13967>
- Suharti, L., et al. (2023). Developing a sustainable tourism village model: An exploratory study. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 25(1), 63. <https://doi.org/10.9744/jmk.25.1.63-82>
- Sukarno, L. H., et al. (2023). Analisis hubungan modal sosial dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Embung Setumpeng, Kabupaten Karanganyar. *Journal of Tourism and Creativity*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.19184/jtc.v7i1.38176>
- Susetyaningsih, A., et al. (2023). Penerapan teknologi untuk pengembangan desa wisata Cinunuk. *Jurnal PkM MIFTEK*, 3(2), 90. <https://doi.org/10.33364/miftek/v.3-2.1314>
- Tapparan, S. R., et al. (2022). Strategi pengembangan obyek wisata Hutan Pinus To’Nakka Uluvalu Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1909. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2621>
- Tresiana, N., & Kartika, T. (2024). Developing a model for sustainable traditional tourism village. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(6), 2135. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190613>
- Utami, I. J. (2023). Pengembangan pariwisata berbasis budaya berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 di Provinsi Banten. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara Dan Hukum*, 1(1), 301. <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.242>